

Desentralisasi buka pintu korupsi di daerah

Kamis, 3 Mei 2012 19:24 WIB | 1260 Views

Phnom Penh (ANTARA News) - Desentralisasi bukan hanya telah memperbanyak jumlah pejabat publik yang dipilih rakyat sehingga meningkatkan proses demokrasi di tingkat lokal, namun ternyata juga membuka pintu bagi korupsi dan politik uang, demikian kesimpulan sebuah konferensi internasional di Phnom Penh, Kamboja, Kamis.

"Dalam sejumlah kasus di Filipina, Thailand, dan Indonesia, uang berbicara dalam pemilihan pejabat daerah, sehingga merusak proses demokrasi pemerintahan lokal," kata delegasi dari Indonesia Wicaksono Sarosa dalam Konferensi Regional Desentralisasi dan Pemerintahan Lokal di ASEAN.

Dalam konferensi yang dibuka bersama oleh Menteri Dalam Negeri Kamboja Sak Setha dan Deputy Sekjen ASEAN Bagas Hapshoro, Wicaksono mengatakan sebetulnya bukan desentralisasinya yang salah, tetapi sistem pemilihan langsung kepala daerah yang membuka peluang terjadinya peluang korupsi.

"Mahalnya biaya pilkada menjadi penyebab utama mengapa kepala daerah melakukan korupsi. Mereka ingin segera balik modal dengan memberikan secara gampang izin-izin yang menjadi diskresi dan kewenangannya," kata Wicaksono dari Kemitraan, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat.

Menurut dia, dahulu calon yang bertarung dalam pemilihan gubernur, walikota dan bupati mungkin cukup punya modal Rp10 miliar. Namun kini, biaya pilkada itu bisa mencapai Rp50 miliar atau bahkan lebih.

Ia mengakui bahwa sangat tidak masuk akal jika seorang calon kepala daerah menghabiskan puluhan miliar rupiah berkompetisi dalam pilkada untuk mengejar gaji plus tunjangan yang maksimal dapat diperoleh hingga Rp100 juta per bulan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sebuah rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah menuturkan ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, 17 orang di antaranya adalah gubernur. Hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari 17 gubernur yang dipaparkan Gamawan itu, tak semuanya kini masih menjabat. Mereka yang sudah non-aktif antara lain adalah Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin (kasus korupsi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah) dan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Ariffin (kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran).

Oleh karena desentralisasi memiliki kaitan dengan kasus korupsi di negara-negara Asia Tenggara, Deputy Sekjen ASEAN Bhagas Hapsoro menekankan pentingnya terus diperkuat kapasitas dan pengetahuan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengawasan dari masyarakat madani.

"Desentralisasi dan pemerintahan lokal telah meningkatkan kontrol atas proses demokrasi dan transparansi di kawasan ASEAN," katanya.

Meskipun ada dampak buruknya, semua peserta konferensi sepakat bahwa desentralisasi dan pemerintahan lokal harus diperkuat. "Bukannya dikembalikan ke sentralisasi," kata delegasi dari Thailand.

Konferensi diselenggarakan oleh Proyek Uni Eropa untuk mendukung desentralisasi di negara berkembang (www.uclg-aspac.org) dan Kemitraan untuk Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Asia Tenggara (www.DELGOSEA.eu). (T.A017/S024)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012